

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, Cet-I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusata Hukum FH UII, 2001.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta PT Karya Unipress, 1994.
- Bhenyamin Hossein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*, Disertasi, Pascasarjana UI, 1993.
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia, 2002.
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Joeniarto, *Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-luasnya dan Perkembangan Serta Pokok-pokok Pemerintahan Lokal*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Naratif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2006.

- Mohammad Taufik Makarao , dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- M.Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.
- Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- _____, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Cet-II, 2009.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Naratif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Philipus M Hadjon, ,dkk, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Siahaan, Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Jurnal

- Alphiba, Lathifah, *Kebijakan Pembayaran Pajak Online Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang*, Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto, 2020.
- Angelina Alice Manda, *Kebijakan Pengawasan Pajak Restoran Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi*, Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto, 2017.
- Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000." Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Batoebara, M, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Publik, 1(1), 2016.
- Badan Keuangan Daerah, *Laporan Tahunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga*, Januari, Jawa Tengah, Purbalingga, 2020.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, *Laporan Tahunan Data Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga*, Januari, Jawa Tengah, Purbalingga, 2020.
- Hananto, Untung Dwi, *Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Masalah-Masalah Hukum, 40.2, 2011.
- Hohakay, Kristina, Wilson Rompas, and Joyce Rares, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi Publik 2.30, 2015.
- Hardian, "Otonomi Daerah Sebuah Solusi atau Menambah Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam," Makalah Sekolah Pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Leasiwal, Djein, Alden Laloma, And Novie Anders Palar. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu Studi Di Dinas Perindakop Dan Umkm)*. Jurnal Administrasi Publik 4.49, 2018.
- Nugroho, *Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Hukum. UNSOED, Purwokerto, 2019.
- Yuliani, Ratna, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pelayanan Pasar (Study di Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012.

Suganda, Delfi. *Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan*, Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science, 2016.

Rujukan Elektronik

Anonim, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, https://bappenda.ntbprov.go.id/assets/doc/ppid/pajak_daerah_dan_retribusi_daerah. , Diakses Pada 20 Februari 2021 Pukul 13.00 WIB.

Anonim, *Retribusi Daerah*, <http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi#:~:text=Rtribusi%20Daerah%2C%20yang%20selanjutnya%20disebut,kepentingan%20orang%20pribadi%20atau%20Badan>, Diakses Pada 23 Maret 2021 Pukul 14.13 WIB.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, *Purbalingga Dalam Angka*, <https://purbalinggakab.bps.go.id/publication/2021/kabupaten-purbalingga-dalam-angka-2021.html>, Diakses Pada 11 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB.

Billy Fajar, *Retribusi Daerah: Pengertian, jenis, Tarif, dan Bedanya dari Pajak Daerah*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah#elementoraction%3Aaction%3Dpopup%3Aclose%26settings%3DeyJkb19ub3Rfc2hvd19hZ2FpbI6InllcyJ9>, Diakses Pada 20 Desember 2020 Pukul 22.00 WIB.

Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-0>, Diakses Pada 20 Februari 2021 Pukul 15.00 WIB.

Santoso Agus, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361>, Diakses Pada 27 Januari 2021 Pukul 16.03 WIB.

Wijayanti Nur, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, <https://host-pustaka.umi.ac.id/index.php/jmh/article/view/2001>, Diakses Pada 13 Maret 2021 Pukul 20.20 WIB.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, *Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga*, diakses dari <https://dinperindag.purbalinggakab.go.id/>, pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Suprihastono Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 17 Januari 2021

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

_____, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga

_____, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Harga Sewa Kios, Kios Dalam Los/Lapak, Los/Lapak, Dan Pelataran Pada Pasar Segamas Purbalingga

_____, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Menempati dan Surat Izin Berjualan di Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga

_____, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga.